



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSTINA ELISTYA DEWI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM
3. NHK : 803424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

1. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/57 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 384.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT AUTOMATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 223.816.441

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.707.816.441

III. HUTANG Rp. 725.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.982.816.441

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.